

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Yani, 2002, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, Ed.1.,Cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, *Hukum Kebijakan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Erly, Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Farida, Ai Siti, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Pustaka setia.
- Guritno. 1992, *Kamus Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Koswara E.,*Paradigma Baru Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepentingan Rakyat*, dalam jurnal Widyapraja, Tahun XXIV. No.34, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta, Erlangga.
- Kusnadi, Arina, Zain Moh, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:
- Mukti Fajar dan Yulianto Acham, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Raden, Santoso, Brotodihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Ed.3, Cetakan.15 Bandung: Eresco.
- Rochmat, Sumitro, 1992, *Asas dan dasar perpajakan*, Cet.5, Bandung:Eresco.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Sudarno, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga,
- Soerjono Soekanto dalam buku, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991.

Tarmudji, Tarsis. 2004. *Memahami Pajak dan Perpajakan*: Unnes.

Tjip, Ismail, s2007, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*, Edisi kedua, Yellow Printing, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan BA.Ilyas, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Widjaja. AW. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta:Eera Swasta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 8.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah.

Internet

Humas sekda Kabupaten Kuningan “ *Pengelolaan PBB P2 dilaunching*”, <http://humaskuningan.blogspot.co.id/2014/03/pengelolaan-pbb-p2-dilaunching.html>., Diunduh pada tanggal 1 November 2016 pukul.19:30.

Pikiran rakyat, “*Sebelas kabupaten/kota di Jawa Barat belum mulai melakukan pengelolaan PBB P2*”,

<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2013/05/17/235199/sebelas-kabkota-belum-mulai-lakukan-pengelolaan-pbb-p2>, diunduh pada tanggal. 1 November 2016, pukul.19:53 Wib.

Radar Kuningan, “*Realisasi PBB Kabupaten Kuningan tahun 2015*”, <https://kuningankab.go.id/berita/realisasi-pbb-kabupaten-kuningan-tahun-2015-over-target>, diunduh pada tanggal 10 September 2016, pukul.17:40 Wib.

Rakyat Cirebon “*Penerimaan Pajak Pendapatan Asli Daerah 2016 kab.Kuningan*”, www.rakyatcirebon.co.id, diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul.19:45 Wib.